RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				**Non Urusan**								
0	0			**-**								
0	0	1		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	99%	1.726.752.500			0	2.548.717.380
0	0	1	**22**	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Provinsi, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara, Mamasa ()	Persentase perjalanan dinas yang sesuai dengan tujuan perjalanan dinasnya berdasarkan laporan yang masuk	0 persen	303.000.000	Pendapatan Daerah	Agar tercapai efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja organisasi perlu koordinasi antar instansi-instansi terkait	0 persen	665.500.000
0	0	1	**11**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD ()	Tersedianya kebutuhan barang yang dicetak dan digandakan	12 Bulan	5.250.000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	5.445.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	**10**	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD ()	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	110.000.000	Pendapatan Daerah	Agar dapat menunjang penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, perlu menjamin ketersediaan kebutuhan ATK dalam melaksanakan tugas kantor/kedinasan	12 Bulan	145.200.000
0	0	1	**6**	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional roda 4 dan 2	SKPD ()	KDO memiliki STNK aktif, dan berkondisi baik ; Jumlah KDO roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	22 Unit;22 Unit	250.000.000	Pendapatan Daerah	Agar dapat menunjang penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, perlu didukung kelancaran mobilitas/operasional kegiatan sehari-hari	22 Unit;22 Unit	278.300.000
0	0	1	**15**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD ()	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan;10 Item	39.000.000	Pendapatan Daerah	Agar setiap aparatur mengetahui informasi terupdate dan aturan perundang-undangan yang berlaku.	12 Bulan;10 Item	42.955.000
0	0	1	**1**	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	SKPD ()	Persentase jumlah surat yang ditangani; Terselenggaranya pelayanan surat menyurat	0 persen;12 Bulan	31.350.000	Pendapatan Daerah	Agar dapat menunjang penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, perlu menyediakan fasilitas kantor dalam rangka mendukung peningkatan kinerja jasa surat menyurat	0 persen;12 Bulan	34.485.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	**17**	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD ()	Tersedianya makanan dan minuman sesuai kebutuhan (Rapat, Tamu dsb)	12 Bulan	160.000.000	Pendapatan Daerah	Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan mahluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar (alasan) berusaha. Salah satu kebutuhan yang paling dasar adalah makanan dan minuman. setiap orang membutuhkannya agar memiliki kesehatan yang prima sehingga dapat beraktifitas.	12 Bulan	176.512.380
0	0	1	**2**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD ()	Tersedianya jaringan telepon/speedy, Air PAM & Listrik	12 Bulan	91.552.500	Pendapatan Daerah	Agar dapat menunjang penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, perlu menyediakan fasilitas kantor dalam rangka mendukung peningkatan kinerja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	100.732.500

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	**8**	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD ()	Jumlah ruangan yang bersih & nyaman	9 Ruangan	100.000.000	Pendapatan Daerah	Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau.Kita perlu menjaga kebersihan agar sehat dan merasa nyaman beraktifitas.	9 Ruangan	175.450.000
0	0	1	**18**	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah (Jakarta, Bali, Bogor, Bandung, Makassar, Manado dll (dikondisikan))	Persentase perjalanan dinas yang sesuai dengan tujuan perjalanan dinasnya berdasarkan laporan yang masuk	0 persen	593.000.000	Pendapatan Daerah	Agar tercapai efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja organisasi perlu koordinasi antar instansi-instansi terkait.	0 persen	876.040.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	**12**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Gedung Kantor	SKPD ()	Tersedianya komponen instalasi listrik di setiap ruangan	9 Ruangan	6.000.000	Pendapatan Daerah	Dalam bangunan kantor, lingkungan penerangan dibutuhkan untuk kepuasan pekerja, kualitas kerja dan produktivitas. Untuk tujuan tersebut, cahaya harus memenuhi persyaratan minimal untuk kenyamanan visual. Selain itu, cahaya juga memainkan peranan penting dalam menciptakan suasana ruang dimana cahaya memberikan dampak terhadap mood pengguna ruang dan kepuasan pengguna. Dalam ruang kerja, kondisi pencahayaan yang baik harus tersedia. Ketika pencahayaan dalam ruang kantor kurang memenuhi, pekerja dapat merasa tidak nyaman dan tidak puas sehingga dapat mengurangi produktivitas.	9 Ruangan	6.715.500

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	**5**	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	SKPD ()	KDO mendapat jaminan asuransi; Jumlah KDO mendapat jaminan asuransi	12 Bulan;1 Unit	9.900.000	Pendapatan Daerah	Asuransi mobil ditujukan untuk melindungi dari berbagai ancaman bahaya yang tidak terduga misalnya tabrakan, pencurian beberapa bagian mobil atau bahkan mobil itu sendiri yang dicuri. Dengan melindungi mobil dengan asuransi, kita dapat mengendarai mobil dengan rasa tenang dan aman ke manapun bepergian	12 Bulan;1 Unit	10.890.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	1	**9**	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD ()	Persentase peralatan kerja dapat difungsikan	0 persen	27.700.000	Pendapatan Daerah	Salah satu upaya meningkatkan produktiifitas kerja dengan bantuan peralatan kerja yang memadai, namun dalam pemakaiannya peralatan sering mengalami kerusakan baik ringan maupun berat, untuk menjaga agar peralatan tetap berfungsi sebagaimana mestinya serta memiliki umur ekonomis yang panjang, peralatan yang digunakan perlu mengalami perbaikan secara berkala.	0 persen	30.492.000
0	0	2		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	155.650.000			0	713.295.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	**22**	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD ()	Jumlah/Luas gedung kantor yang dipelihara	2.500 M2	12.650.000	Pendapatan Daerah	Pemeliharan (maintenance) bangunan adalah sangat penting dan perlu setelah bangunan tersebut selesai dibangun dan dipergunakan. Pemeliharaan ini akan membuat umur bangunan tersebut menjadi lebih panjang, ditinjau dari aspek : kekuatan, keamanan, dan penampilan (performance) bangunan. Bahwa berhasil atau tidaknya suatu pembangunan gedung dapat dilihat dari usia pemakaian bangunan sesuai dengan rancangan bangunannya dan tata cara pemeliharaan terhadap bangunan itu sendiri.	2.500 M2	13.915.000
0	0	2	**9**	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD ()	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	93.000.000	Pendapatan Daerah	Untuk menunjang operasional penyelenggaraan pemerintah, aparatur perlu dilengkapi peralatan kerja yang memadai	1 Paket	360.580.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	2	**10**	Pengadaan Mebeulair	SKPD ()	Jumlah mebeulair yang diadakan	1 Paket	50.000.000	Pendapatan Daerah	Untuk menunjang operasional penyelenggaraan pemerintah, aparatur perlu dilengkapi sarana dan prasarana kerja.	1 Paket	338.800.000
0	0	5		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		Meningkatnya wawasan, pendidikan dan pengetahuan aparatur terhadap peraturan kepegawaian serta kemampuan manajerial PNS	98%	530.000.000			0	1.677.995.000
0	0	5	**5**	Pendidikan dan Pelatihan	Luar Daerah, Provinsi, Mamuju ()	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan	68 Orang	450.000.000	Pendapatan Daerah	Pendidikan dan pelatihan (Diklat) merupakan salah satu strategi meningkatkan kualitas dan kapabilitas Sumber Daya Aparatur sehingga dapat menjadi aparatur yang profesional.	68 Orang	1.547.700.000
0	0	5	**53**	Workshop SPIP	SKPD ()	Jumlah peserta workshop SPIP	30 Orang	80.000.000	Pendapatan Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pasal 4 huruf g, dan pasal 11 huruf a, b dan c	30 Orang	130.295.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	6		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		Pengelolaan keuangan daerah dengan predikat	3 Opini BPK	59.809.750			0	156.211.000
0	0	6	**4**	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD ()	Dokumen Laporan Keuangan tepat waktu, Paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya	1 Laporan	6.050.000	Pendapatan Daerah		1 Laporan	6.655.000
0	0	6	**1**	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD ()	Dokumen Laporan Keuangan tepat waktu, Paling lambat tanggal 10 bulan berjalan	12 Bulan	30.000.000	Pendapatan Daerah		12 Bulan	123.420.000
0	0	6	**28**	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	SKPD ()	SPM, Register Pengesahan, Neraca, LRA, Calk	12 Bulan	23.759.750	Pendapatan Daerah		12 Bulan	26.136.000
1				**Wajib**								
1	20			**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**								
1	20	20		**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**		Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	98%	5.095.495.250			0	4.730.486.620

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	20	**4**	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Di Bawahnya	Provinsi, SKPD, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara, Mamasa ()	Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat	0 persen	767.000.000	Pendapatan Daerah	Pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintahan terkait berupa sumbangan pikiran suara, gagasan ,keluhan, pengaduan, yang bersifat membangun.	0 persen	549.945.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	20	**27**	Review laporan keuangan SKPD & Pemprov. Sulbar	SKPD ()	Dimanfaatkannya Laporan Hasil Reviu Keuangan oleh BUD untuk perbaikan LKPD	1 Laporan	258.000.000	Pendapatan Daerah	-Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; -Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014; dan -Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 57 ayat 2 Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi sebelum disampaikan Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan.	1 Laporan	139.150.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	20	**34**	Rapat koordinasi pengawasan daerah (RAKORWASDA)	SKPD ()	Terbitnya Program Kerja Pengawasan Kerja Tahunan APIP	0 Surat Keputusan	334.000.000	Pendapatan Daerah	-Untuk menyamakan persepsi tentang lingkup tugas pengendalian oleh pimpinan dan meningkatkan pemahaman tentang peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai mitra dalam pelaksanaan pengawasan. - untuk menciptakan sinergi pengawasan intern yang efektif, efisien dan akuntabel yang dpaat mendorong terwujudnya tata kelola yang baik (good governance dan clean government) pada tiap unit kerja dilingkungan Pemerintah se-Sulawesi Barat.	0 Surat Keputusan	95.638.620
1	20	20	**35**	Monitoring Implementasi SPIP	SKPD ()	Jumlah SKPD yang mendapatkan Monitoring Implementasi SPIP	40 SKPD	298.000.000	Pendapatan Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	40 SKPD	395.855.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	20	**1**	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Provinsi, SKPD, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara, Mamasa ()	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	40 LHP	1.901.800.000	Pendapatan Daerah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);	40 LHP	2.043.206.000
1	20	20	**28**	Pelaksanaan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	Provinsi, Mamuju, Mamuju Utara, Majene, Mamuju Tengah ()	Jumlah Laporan Hasil Penjab	4 Laporan	322.100.000	Pendapatan Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Masa Akhir Jabatan Kepala Daerah.	4 Laporan	163.350.000
1	20	20	**31**	Evaluasi Berkala SAKIP dan LAKIP SKPD	Provinsi, SKPD, Mamuju Utara, Mamasa ()	Nilai Evaluasi AKIP	0 Nilai	255.000.000	Pendapatan Daerah	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi AKIP	0 Nilai	284.834.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	20	**6**	Tindak Lanjut hasil Temuan Pengawasan	Provinsi, SKPD, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara, Mamasa ()	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	80 persen	515.000.000	Pendapatan Daerah	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah bahwa APIP harus memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan auditi untuk memastikan bahwa semua rekomendasi sudah dilaksanakan dengan tepat, sehingga keefektifan pelaksanaan audit bisa tercapai. Pemantauan tindak lanjut audit diartikan sebagai suatu tindakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atau perbaikan, yang dilakukan oleh pimpinan auditi, atas rekomendasi auditor berdasarkan temuan audit yang	80 persen	343.640.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	20	**29**	Pelaksanaan Pengawasan Satuan Kerja Pemprov. Sulbar	SKPD ()	Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan	24 SKPD	389.595.250	Pendapatan Daerah	Salah satu fungsi Inspektorat adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	24 SKPD	598.950.000
1	20	20	**36**	Asistensi pelaksanaan perpres No. 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang	SKPD ()	Jumlah Laporan Hasil Asistensi	1 Laporan	55.000.000	Pendapatan Daerah		1 Laporan	115.918.000
1	20	20	**37**	Asistensi perencanaan dan penyusunan anggaran	SKPD ()	Jumlah SKPD yang diasistensi	40 SKPD	0	Pendapatan Daerah		40 SKPD	0
1	20	99		**Program peningkatan kapasitas kelembagaan pembangunan daerah**		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah	98%	353.000.000			0	423.870.000
1	20	99	**25**	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara, Mamasa ()	Nilai hasil Evaluasi Laporan LPPD kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat	0 Nilai	283.000.000	Pendapatan Daerah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,	0 Nilai	298.870.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	99	**87**	SOP	Luar Daerah (Yogyakarta, Bandung, Makassar (dikondisikan))			70.000.000	Pendapatan Daerah	Standart Operating Prosedure (SOP) adalah serangkaian instruksikerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.		125.000.000
1	20	99		**Program peningkatan komunikasi dan informasi serta penggunaan media massa**		Meningkatnya kualitas penyebaran informasi dan komunikasi	0%	35.000.000			0	22.000.000
1	20	99	**36**	Pengadaan Website Resmi Inspektorat Daerah Provinsi Sulbar	SKPD ()	Website Resmi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	0 website	35.000.000	Pendapatan Daerah		0 website	22.000.000
1	20	99		**Program peningkatan profesionalisme Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat**		Meningkatnya kualitas aparat pengawas	60 Jam	285.000.000			0	284.350.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	99	1	Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	SKPD ()	Jumlah jam pelatihan yang dilaksanakan; Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	40 Jam;75 Orang	285.000.000	Pendapatan Daerah	Salah satu kewajiban Auditor sebagaimana ditetapkan dalam standar pengawasan Inspektorat Jenderal Kementrian adalah meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta kompetensi lain melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan (Continuing Profesional Education), guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan APIP dan perkembangan lingkungan pengawasan. Pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan (Continuing Profesional Education) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran terus	40 Jam;75 Orang	284.350.000
					TOTAL			**8.240.707.500**				**10.556.925.000**